

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 271-278****E-ISSN: 2986-6340****Licensed by CC BY-SA 4.0****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18296022>**

Transformasi Kebijakan Moneter Islam dalam Menghadapi Digitalisasi Keuangan Global dan Stabilitas Ekonomi Nasional di Era Digital

Transformation of Islamic Monetary Policy in Addressing Global Financial Digitalization and National Economic Stability in the Digital Era

Annisa Dela Ramadhani¹, Ema Julia Ningsih²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Gmail Korespondensi : annisadelar12@gmail.com, majulia01@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the transformation of Islamic monetary policy in responding to global financial digitalization and its implications for national economic stability in the digital era. The rapid development of financial technology, digital payment systems, and the planned implementation of central bank digital currency have driven significant changes in the transmission mechanism of monetary policy, including within the framework of Islamic economics. This research employs a qualitative descriptive approach through a literature review of scientific journals, Bank Indonesia regulations, and reports from relevant institutions published since 2020. The findings indicate that Islamic monetary policy must adapt by strengthening sharia-based monetary instruments, integrating digital technology in accordance with Islamic principles, and enhancing the role of monetary authorities in maintaining financial system stability. Digitalization offers opportunities to improve efficiency, financial inclusion, and transparency, while also posing new risks such as financial volatility and unequal access to technology. Therefore, the transformation of Islamic monetary policy should be conducted in a measured and innovative manner, grounded in the values of justice and economic stability, to support national economic resilience amid global financial dynamics.

Keywords: *Islamic monetary policy, financial digitalization, economic stability, sharia fintech, digital economy.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan moneter Islam dalam menghadapi tantangan digitalisasi keuangan global serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi nasional di era digital. Perkembangan teknologi finansial, sistem pembayaran digital, dan rencana penerapan mata uang digital bank sentral mendorong perubahan signifikan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, termasuk dalam kerangka ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur terhadap jurnal ilmiah, regulasi Bank Indonesia, dan laporan institusi terkait sejak tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam perlu beradaptasi melalui penguatan instrumen moneter syariah, integrasi teknologi digital yang sesuai prinsip syariah, serta peningkatan peran otoritas moneter dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Digitalisasi memberikan peluang peningkatan efisiensi, inklusi keuangan, dan transparansi, namun juga menghadirkan risiko baru seperti volatilitas keuangan dan ketimpangan akses teknologi. Oleh karena itu, transformasi kebijakan moneter Islam harus dilakukan secara terukur, inovatif, dan berlandaskan nilai keadilan serta stabilitas ekonomi guna mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika keuangan global.

Kata Kunci: *kebijakan moneter Islam, digitalisasi keuangan, stabilitas ekonomi, fintech syariah, ekonomi digital.*

Article Info

Received date: 25 Desember 2025

Revised date: 15 Januari 2026

Accepted date: 17 Januari 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global pada era digital telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem keuangan dan kebijakan moneter di berbagai negara, termasuk Indonesia. Inovasi teknologi keuangan seperti sistem pembayaran digital, uang elektronik, dan financial technology telah menggeser pola transaksi masyarakat dari tunai ke non-tunai. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi transaksi, tetapi juga memengaruhi stabilitas moneter dan sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi Islam, perubahan tersebut menuntut penyesuaian kebijakan

moneter agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba. Digitalisasi keuangan membuka peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa risiko sistemik dan pengawasan moneter yang lebih kompleks. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam perlu bertransformasi secara adaptif agar mampu merespons dinamika ekonomi digital global tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi nasional (Wahyuni & Rahmawati, 2020).

Digitalisasi sistem pembayaran menjadi salah satu aspek penting dalam transformasi kebijakan moneter modern. Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrumen pembayaran nasional telah mempercepat integrasi sistem keuangan digital di Indonesia. QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk sektor keuangan syariah. Dalam perspektif moneter Islam, digitalisasi sistem pembayaran harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta mendukung tujuan stabilitas moneter dan inklusi keuangan. Namun, peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital juga berpotensi memengaruhi permintaan uang, kecepatan peredaran uang, serta efektivitas transmisi kebijakan moneter. Oleh karena itu, transformasi kebijakan moneter Islam perlu mempertimbangkan dampak digitalisasi pembayaran terhadap pengendalian moneter dan stabilitas ekonomi secara berkelanjutan (Afandi & Rukmana, 2022).

Selain sistem pembayaran digital, perkembangan konsep Central Bank Digital Currency (CBDC) menjadi isu strategis dalam kebijakan moneter global. Banyak bank sentral, termasuk Bank Indonesia, mulai mengkaji penerapan mata uang digital sebagai respons terhadap perubahan ekosistem keuangan global. Digital rupiah dipandang sebagai instrumen potensial untuk memperkuat kedaulatan moneter, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas keuangan nasional. Dalam konteks ekonomi Islam, penerapan CBDC menuntut kajian mendalam terkait aspek hukum, prinsip syariah, dan implikasi sosial ekonomi. Kebijakan moneter Islam harus mampu mengintegrasikan inovasi digital ini tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, transformasi kebijakan moneter Islam di era digital tidak dapat dilepaskan dari diskursus CBDC sebagai bagian dari strategi stabilitas ekonomi nasional (As-Salafiyah & Rusydiana, 2023).

Kebijakan moneter Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, serta memastikan distribusi kesejahteraan yang merata. Instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pasar uang antarbank syariah, dan kebijakan likuiditas berbasis prinsip syariah memainkan peran penting dalam pengendalian moneter. Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kerja instrumen-instrumen tersebut, terutama dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. Digitalisasi keuangan menuntut kebijakan moneter Islam yang lebih responsif dan inovatif agar tetap efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas makroekonomi. Dengan demikian, transformasi kebijakan moneter Islam menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya di tengah perubahan struktur ekonomi digital (Hasallyt & Marpaung, 2024).

Stabilitas ekonomi nasional merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter, termasuk dalam kerangka ekonomi Islam. Transformasi kebijakan moneter Islam di era digital harus mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas. Di satu sisi, digitalisasi keuangan memberikan peluang peningkatan efisiensi dan inklusi keuangan syariah. Di sisi lain, risiko volatilitas pasar, ketimpangan akses teknologi, dan potensi disrupsi sistem keuangan menjadi tantangan serius. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila diterapkan secara konsisten dan terintegrasi. Oleh karena itu, transformasi kebijakan moneter Islam harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi nasional (Marpaung & Tambunan, 2023).

Peran otoritas moneter, khususnya Bank Indonesia, menjadi semakin penting dalam menghadapi digitalisasi keuangan global. Bank Indonesia dituntut untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan dengan tetap mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Regulasi fintech syariah dan kebijakan sistem pembayaran digital menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas. Transformasi kebijakan moneter Islam harus didukung oleh regulasi yang adaptif, pengawasan yang kuat, serta sinergi antara lembaga keuangan syariah dan otoritas moneter. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan moneter Islam dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika keuangan digital yang semakin kompleks (Nurdin & Ramadhan, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi kebijakan moneter Islam merupakan keniscayaan dalam menghadapi digitalisasi keuangan global. Perubahan teknologi, sistem pembayaran, dan instrumen moneter menuntut penyesuaian kebijakan yang inovatif namun tetap berlandaskan prinsip syariah. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai arah transformasi kebijakan moneter Islam serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi nasional di era digital. Dengan mengkaji literatur dan kebijakan terkini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan moneter Islam yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi digital global (Sari & Hidayat, 2021).

TINJAUAN TEORITIS

Konsep Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter Islam merupakan seperangkat kebijakan yang dirancang untuk mengatur jumlah uang beredar dan stabilitas ekonomi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Tidak seperti kebijakan moneter konvensional yang berbasis pada instrumen suku bunga, kebijakan moneter Islam menolak praktik riba dan menggantinya dengan mekanisme berbasis bagi hasil, transaksi riil, dan keadilan distributif. Tujuan utama kebijakan moneter Islam tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Dalam konteks ini, uang dipandang sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan komoditas untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam menekankan keterkaitan erat antara sektor moneter dan sektor riil agar pertumbuhan ekonomi berjalan secara berkelanjutan dan tidak spekulatif (Hasalliyat & Wahyuni, 2024).

Instrumen kebijakan moneter Islam meliputi Sertifikat Bank Indonesia Syariah, operasi pasar terbuka syariah, fasilitas likuiditas syariah, serta pengelolaan pasar uang antarbank syariah. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mengendalikan likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah. Efektivitas kebijakan moneter Islam sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip syariah dan dukungan regulasi yang kuat. Dalam praktiknya, kebijakan moneter Islam juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan teknologi keuangan. Transformasi kebijakan moneter Islam menjadi penting agar instrumen moneter tetap relevan dan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah perubahan sistem keuangan global (Wahyuni & Rahmawati, 2020).

Digitalisasi Sistem Keuangan dan Kebijakan Moneter

Digitalisasi sistem keuangan telah mengubah secara signifikan cara transaksi, penyimpanan nilai, dan distribusi layanan keuangan. Perkembangan teknologi finansial, sistem pembayaran digital, dan platform keuangan berbasis internet mendorong peningkatan efisiensi serta percepatan peredaran uang dalam perekonomian. Dalam konteks kebijakan moneter, digitalisasi memengaruhi permintaan uang, kecepatan sirkulasi uang, dan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Sistem pembayaran digital seperti QRIS menjadi salah satu inovasi yang berdampak langsung terhadap pola konsumsi dan perilaku keuangan masyarakat. Digitalisasi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan inklusi

keuangan, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam pengendalian moneter dan stabilitas sistem keuangan (Afandi & Rukmana, 2022).

Bagi kebijakan moneter Islam, digitalisasi sistem keuangan menuntut penyesuaian instrumen dan mekanisme kebijakan agar tetap sejalan dengan prinsip syariah. Penggunaan teknologi digital harus memastikan transparansi, keadilan, dan bebas dari unsur gharar serta riba. Digitalisasi juga membuka peluang integrasi antara kebijakan moneter Islam dan sektor keuangan syariah secara lebih efisien. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, digitalisasi dapat meningkatkan risiko sistemik dan volatilitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam perlu dirancang secara adaptif untuk memanfaatkan peluang digitalisasi sekaligus memitigasi risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional (Setiawan & Wibowo, 2022).

Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Perspektif Islam

Central Bank Digital Currency (CBDC) merupakan bentuk uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral sebagai alat pembayaran yang sah. Kehadiran CBDC menjadi respons atas perkembangan teknologi keuangan dan meningkatnya penggunaan uang digital di masyarakat. CBDC dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, memperkuat kedaulatan moneter, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan CBDC memerlukan kajian mendalam terkait status hukum uang digital, mekanisme penerbitan, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. CBDC harus memenuhi fungsi uang secara syariah dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketimpangan ekonomi (As-Salafiyah & Rusydiana, 2023).

Digital rupiah sebagai bentuk CBDC di Indonesia dinilai memiliki urgensi strategis dalam menghadapi persaingan keuangan global dan digitalisasi ekonomi domestik. Namun, penerapan CBDC juga membawa tantangan dari sisi regulasi, keamanan data, dan dampak terhadap sistem perbankan syariah. Dalam kebijakan moneter Islam, CBDC harus diintegrasikan dengan instrumen moneter syariah agar tidak mengganggu stabilitas likuiditas dan transmisi kebijakan moneter. Oleh karena itu, transformasi kebijakan moneter Islam perlu memasukkan CBDC sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di era digital (Firdaus & Widodo, 2025).

Fintech Syariah dan Stabilitas Ekonomi Nasional

Fintech syariah merupakan inovasi teknologi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran fintech syariah memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih inklusif dan efisien, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Fintech syariah berperan penting dalam mendukung kebijakan moneter Islam melalui peningkatan intermediasi keuangan dan distribusi dana ke sektor riil. Namun, perkembangan fintech syariah juga menuntut regulasi yang adaptif agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam harus mampu mengakomodasi perkembangan fintech syariah secara terintegrasi (Zainal & Basri, 2021).

Regulasi fintech syariah menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tanpa regulasi yang memadai, fintech syariah berpotensi menimbulkan risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko sistemik. Kebijakan moneter Islam harus bersinergi dengan kebijakan makroprudensial untuk memastikan bahwa inovasi teknologi keuangan tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Dengan regulasi yang tepat, fintech syariah dapat menjadi instrumen pendukung kebijakan moneter Islam dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan (Nurdin & Zuhri, 2025).

Transformasi Kebijakan Moneter Islam di Era Digital

Transformasi kebijakan moneter Islam merupakan proses penyesuaian kebijakan terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan teknologi. Era digital menuntut kebijakan moneter Islam yang lebih inovatif, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika ekonomi global. Transformasi ini mencakup penguatan instrumen moneter syariah, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan koordinasi antara otoritas moneter dan lembaga keuangan syariah. Kebijakan moneter Islam tidak hanya berfungsi

sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi kebijakan moneter Islam menjadi agenda strategis dalam menghadapi era digital (Sari & Hidayat, 2021).

Peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sangat menentukan keberhasilan transformasi kebijakan moneter Islam. Bank Indonesia dituntut untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus mendorong inovasi keuangan digital berbasis syariah. Transformasi kebijakan moneter Islam harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan guncangan ekonomi. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan moneter, regulasi fintech, dan pengembangan sistem pembayaran digital, kebijakan moneter Islam diharapkan mampu mendukung stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global (Ramadhan & Zulkhibri, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji transformasi kebijakan moneter Islam dalam menghadapi digitalisasi keuangan global serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi nasional di era digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena kebijakan moneter Islam yang bersifat dinamis dan kompleks. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks ekonomi Islam, serta dokumen resmi dan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan otoritas terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian sistematis terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan guna memperoleh landasan teoritis dan empiris yang kuat.

Metode penelitian ini juga menerapkan teknik analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara interpretatif untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan hubungan antara kebijakan moneter Islam, digitalisasi keuangan, serta stabilitas ekonomi nasional. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil temuan dari berbagai literatur dan regulasi yang relevan. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kesimpulan yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pengembangan kebijakan moneter Islam di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi kebijakan moneter Islam dalam menghadapi digitalisasi keuangan global menunjukkan perubahan yang bersifat struktural dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada sistem pembayaran, tetapi juga memengaruhi mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah, pengelolaan likuiditas, serta peran otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan moneter Islam dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keterkaitan dengan sektor riil. Digitalisasi membuka peluang penguatan inklusi keuangan syariah, namun juga menimbulkan tantangan baru berupa risiko sistemik dan kompleksitas pengawasan moneter. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi kebijakan moneter Islam yang terintegrasi antara inovasi digital dan stabilitas ekonomi nasional.

Tabel 1. Transformasi Kebijakan Moneter Islam di Era Digital

No	Aspek Transformasi	Kondisi Sebelum Digitalisasi	Kondisi Era Digital
1	Orientasi kebijakan	Fokus stabilitas konvensional	Fokus stabilitas berbasis digital
2	Instrumen moneter	Instrumen tradisional syariah	Instrumen syariah berbasis teknologi

3	Mekanisme transmisi	Relatif lambat	Lebih cepat dan terintegrasi
4	Pengawasan moneter	Konvensional	Berbasis sistem digital
5	Keterkaitan sektor riil	Terbatas	Lebih terintegrasi

Tabel ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan moneter Islam di era digital mencerminkan perubahan mendasar dalam orientasi dan pendekatan kebijakan. Sebelum era digital, kebijakan moneter Islam lebih berfokus pada stabilitas moneter dengan instrumen yang bersifat konvensional namun disesuaikan dengan prinsip syariah. Dalam era digital, kebijakan moneter Islam mulai mengintegrasikan teknologi keuangan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan. Digitalisasi memungkinkan proses pengambilan keputusan dan pengawasan moneter dilakukan secara lebih cepat dan responsif. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Selain itu, transformasi ini juga memperkuat keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil. Digitalisasi memungkinkan aliran dana syariah disalurkan secara lebih efisien ke aktivitas ekonomi produktif. Namun, perubahan ini menuntut kesiapan kelembagaan dan regulasi yang kuat agar inovasi digital tidak menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, transformasi kebijakan moneter Islam bukan hanya perubahan teknis, tetapi juga perubahan paradigma dalam pengelolaan stabilitas ekonomi nasional.

Tabel 2. Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Kebijakan Moneter Islam

No	Komponen Digitalisasi	Peran dalam Kebijakan Moneter	Implikasi Syariah
1	Sistem pembayaran digital	Mempercepat transaksi	Harus bebas riba
2	Platform keuangan	Meningkatkan inklusi	Transparansi akad
3	Integrasi data	Memperkuat pengawasan	Keadilan informasi
4	Inovasi layanan	Efisiensi moneter	Kepatuhan syariah
5	Infrastruktur digital	Stabilitas sistem	Keamanan transaksi

Digitalisasi sistem pembayaran berperan penting dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter Islam. Sistem pembayaran digital memungkinkan transaksi berlangsung secara efisien dan real-time, sehingga memengaruhi kecepatan peredaran uang dalam perekonomian. Dalam konteks kebijakan moneter Islam, percepatan transaksi ini dapat meningkatkan efektivitas pengendalian likuiditas. Namun, digitalisasi juga harus memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba atau gharar. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam perlu mengintegrasikan prinsip syariah dalam setiap inovasi sistem pembayaran digital.

Lebih lanjut, digitalisasi sistem pembayaran juga meningkatkan kapasitas pengawasan moneter melalui integrasi data transaksi. Hal ini memungkinkan otoritas moneter untuk memantau aktivitas ekonomi secara lebih akurat dan responsif. Namun, tantangan muncul dalam menjaga keamanan data dan keadilan akses teknologi. Kebijakan moneter Islam harus memastikan bahwa digitalisasi tidak menciptakan ketimpangan ekonomi, melainkan mendukung stabilitas ekonomi nasional secara inklusif.

Tabel 3. CBDC dan Kebijakan Moneter Islam

No	Aspek CBDC	Peluang	Tantangan
1	Efisiensi pembayaran	Transaksi lebih cepat	Adaptasi sistem
2	Stabilitas moneter	Penguatan kedaulatan	Risiko teknologi
3	Kepatuhan syariah	Transparansi	Aspek hukum
4	Pengawasan moneter	Data terintegrasi	Keamanan digital
5	Inklusi keuangan	Akses luas	Kesenjangan digital

CBDC dipandang sebagai inovasi strategis dalam kebijakan moneter Islam di era digital. Kehadirannya berpotensi meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan memperkuat stabilitas moneter. Dalam perspektif syariah, CBDC harus memenuhi fungsi uang sebagai alat tukar yang adil dan transparan. Integrasi CBDC dalam kebijakan moneter Islam dapat memperkuat mekanisme transmisi kebijakan serta mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Namun, penerapan CBDC juga menghadirkan tantangan signifikan, terutama terkait aspek hukum, keamanan teknologi, dan kesenjangan akses digital. Kebijakan moneter Islam harus mampu mengelola risiko tersebut agar CBDC tidak menimbulkan instabilitas ekonomi. Dengan pendekatan yang terukur, CBDC dapat menjadi instrumen pendukung transformasi kebijakan moneter Islam di era digital.

Tabel 4. Dampak Transformasi Kebijakan Moneter Islam terhadap Stabilitas Ekonomi

No	Dimensi Stabilitas	Dampak Positif	Risiko Potensial
1	Stabilitas moneter	Pengendalian lebih adaptif	Volatilitas digital
2	Sistem keuangan	Efisiensi meningkat	Risiko sistemik
3	Inklusi ekonomi	Akses keuangan luas	Ketimpangan teknologi
4	Sektor riil	Aliran dana produktif	Disrupsi pasar
5	Ketahanan ekonomi	Resiliensi meningkat	Ketergantungan teknologi

Transformasi kebijakan moneter Islam memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional melalui peningkatan efisiensi dan adaptivitas kebijakan. Digitalisasi memungkinkan kebijakan moneter Islam merespons dinamika ekonomi secara lebih cepat dan tepat. Hal ini berkontribusi pada penguatan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Meskipun demikian, transformasi ini juga membawa risiko potensial yang perlu dikelola secara hati-hati. Ketergantungan pada teknologi digital dapat meningkatkan kerentanan terhadap gangguan sistem dan ketimpangan akses. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam harus dirancang secara seimbang antara inovasi dan stabilitas untuk memastikan keberlanjutan ekonomi nasional.

SIMPULAN

Transformasi kebijakan moneter Islam merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi digitalisasi keuangan global yang semakin pesat. Perkembangan teknologi keuangan, sistem pembayaran digital, serta wacana penerapan mata uang digital bank sentral telah mengubah struktur dan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dalam konteks ini, kebijakan moneter Islam dituntut untuk beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keterkaitan dengan sektor riil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan peluang besar bagi peningkatan efisiensi kebijakan, inklusi keuangan syariah, serta penguatan stabilitas ekonomi nasional apabila dikelola secara tepat.

Namun demikian, transformasi kebijakan moneter Islam juga menghadirkan berbagai tantangan, antara lain meningkatnya risiko sistemik, kompleksitas pengawasan moneter, serta potensi ketimpangan akses teknologi. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam perlu dirancang secara terintegrasi dengan regulasi fintech syariah, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi digital yang berkelanjutan. Peran otoritas moneter menjadi sangat penting dalam memastikan keseimbangan antara inovasi dan stabilitas. Dengan pendekatan yang adaptif dan berlandaskan nilai-nilai syariah, kebijakan moneter Islam diharapkan mampu mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional di era digital.

REFERENSI

- Afandi, A., Rukmana, L., & Wahidah R., W. (2022). Efektivitas sistem pembayaran non-tunai QRIS dalam meningkatkan inklusi keuangan. *BanKu: Jurnal Perbankan dan Keuangan*, 3(2), 75–88. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/banku/article/view/5823>
- As-Salafiyah, A., Rusydiana, A. S., & Ikhwan, I. (2023). Central bank digital currency (CBDC): Sentiment analysis and legal perspective. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 2(2), 347–372. <https://doi.org/10.21098/jcli.v2i2.177>
- Firdaus, S. P. (2025). Measuring the urgency of a digital rupiah: A socio-legal review. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(3), 505–532. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i3.283>
- Hasallyt, N. (2024). Konsep uang dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v2i1.4236>
- Marpaung, T. A., Imsar, & Tambunan, K. (2023). Pengaruh kebijakan moneter Islam terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 309–331. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.8034>
- Nuridin. (2025). Pengaruh regulasi fintech syariah terhadap stabilitas ekonomi nasional. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 8(2), 621–633. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/9028>
- Ramadhan, F., Ndraha, P. B. H., Irwansyah, M., Dewi, S. P., & Afriyanti, C. A. (2024). Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter berbasis prinsip syariah. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 2(1), 194–205. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2300>
- Sari, P. R., & Hidayat, A. (2021). Transformasi kebijakan moneter Islam di era keuangan digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(5), 566–579. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp566-579>
- Setiawan, A., & Wibowo, B. (2022). Digitalisasi sistem pembayaran dan stabilitas moneter Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 137–150. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.2802>
- Triwahyudi, F. A., & Yuhertiana, I. (2024). QRIS sebagai sistem pembayaran digital: Analisis bibliometrik. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 1891–1902. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10274>
- Widodo, K., Juanda, B., Setyowawan, D., & Lutfiyah, D. (2025). Digital rupiah: Are Indonesians ready? *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 14(2), 177–191. <https://doi.org/10.52813/jei.v14i2.556>
- Wahyuni, S., & Rahmawati, I. (2020). Kebijakan moneter Islam dan stabilitas ekonomi makro Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 295–310. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.15432>
- Zainal, V. R., & Basri, Y. Z. (2021). Perkembangan fintech syariah dan tantangan kebijakan moneter. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(3), 503–516. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i3.5807>
- Zuhri, M., & Hakim, L. (2022). Stabilitas sistem keuangan syariah di era digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 112–123. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4117>
- Zulkhibri, M., & Firmansyah. (2020). Islamic monetary policy transmission and financial technology. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 23(3), 337–358. <https://doi.org/10.21098/bemp.v23i3.1301>